

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Moh. Khusani (2018:71) Menyatakan Akuntabilitas Sebagai Berikut:

“inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan”.

Menurut Afrilianti (2017:13) menyatakan Akuntabilitas sebagai berikut:

“suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.

Dapat disimpulkan dari pengertian menurut para ahli di atas bahwa Akuntabilitas Merupakan:

“kewajiban seseorang atau pekerja dalam mempertanggung jawabkan suatu pengendalian Pelaksanaan suatu ketentuan atau kebijakan yang telah di percayakan.”

2.1.1.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002:21), akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator yaitu :

- 1) Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power).
- 2) Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
- 3) Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Adapun Indikator Akuntabilitas menurut (Manggaukang Raba 2006:115) yaitu:

- 1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
- 2) keberadaan kualitas moral yang memadai.
- 3) Kepekaan.
- 4) Keterbukaan.
- 5) pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- 6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengetian Transparansi

Menurut Abdul (2019:30) menyatakan Transparansi sebagai berikut:

“Bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu”

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018:25) Menyatakan Transaparansi Sebagai Berikut:

“memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.”

Dapat disimpulkan dari pengertian menurut para ahli di atas bahwa Transparansi Merupakan:

“kewajiban seseorang atau instansi pemerintah dalam menunjukkan atau menampilkan data sejujurnya terhadap aktor masyarakat dengan jujur, agar masyarakat juga bisa ikut memberikan berbagai macam masukan.”

2.1.2.2 Indikator Transparansi

Indikator Transparansi Menurut Setyaningrum (2017:108), indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
- 2) adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
- 3) adanya Laporan yang independen dan efektif
- 4) adanya keterlibatan masyarakat.

Selain itu Terdapat Indikator Transparansi Menurut Hanifah (2015:7):

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani

2.1.3 Pengawasan

2.1.3.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Daulay. (2017:218) menyatakan Pengawasan sebagai berikut:

“usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Definisi pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan proses unsur-unsur esensial”.

Menurut Handoko. (2018:370) menyatakan Pengawasan sebagai berikut:

“tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal”.

Dapat disimpulkan dari pengertian menurut para ahli di atas bahwa Pengawasan Merupakan:

“kewajiban seseorang atau pekerja dalam mempertanggung jawabkan suatu tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, pengawasan disini harus dilakukan agar kinerja para pekerjanya dapat lebih maksimal lagi dalam menjalankan kewajibannya. “

2.1.3.2 Indikator Pengawasan

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016:290) terdiri dari empat indikator Pengawasan yaitu :

- 1) Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
- 2) Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
- 3) Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
- 4) Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Indikator pengawasan menurut Kartono dalam Jufrizen (2016):

- 1) Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- 2) Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- 3) Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu , memberikan sanksi kepada bawahan

2.1.4 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.5 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mahmudi (2011:92) Menyatakan Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Berikut:

“bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang

diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut”.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:55) Menyatakan Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Berikut:

“Menurut Halim dan Kusufi (2014), Anggaran Berbasis Kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional dan anggaran kinerja”.

Dapat disimpulkan dari pengertian menurut para ahli di atas bahwa Anggaran Berbasis Kinerja Merupakan:

“penganggaran suatu keuangan yang akan memperlihatkan hasil baik atau tidaknya suatu anggaran berbasis kinerja tersebut dan untuk mengetahui beberapa kelemahan agar dapat dievaluasi “

2.1.4.1 Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Seimbring (2009) Indikator Anggaran Berbasis Kinerja yaitu:

- 1) Kontribusi dalam penyusunan anggaran
- 2) Keterlibatan dalam penyusunan anggaran
- 3) Alasan melakukan revisi anggaran
- 4) Usulan kepada atasan
- 5) Penyelesaian akhir dan meminta pendapat atasan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Choirul Saleh (2020:38) Akuntabilitas dipandang sebagai pertanggung jawaban atas berbagai tindakan yang telah dilakukan aktor

pemerintahan dalam pelayanan kepada publik menyangkut seberapa jauh dan seberapa besar pertanggung jawaban anggaran publik yang sudah digunakan dalam mewujudkan program-program pembangunan, Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kinerja anggaran memiliki hubungan yang kuat keduanya digunakan sebagai indikator satu sama lain.

Abdul Halim (2019:41) Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah serta sebagai alat pengukuran akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu:

1. Menurut penelitian S. Apriyanti dan NF. Asyik (2020:19) Pengujian akuntabilitas berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja.
2. Menurut penelitian Redi Antonius Nababan,dkk. (2018) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.
3. Menurut penelitian Fransisca,dkk. (2018) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

2.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Coryanata (2007:17) Transparansi Anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan Kejujuran, Semakin trnsaparan kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu; Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedia laporan pertanggung jawabn yang tepat waktu, terakomodasinya suara atau usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut Nico Andrianto (2017: 21) Transparansi dalam anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah korupsi, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat/publik dan dapat menciptakan iklim investasi yang baik serta dapat meningkatkan kepastian usaha.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu:

1. Menurut Kurniawaty, dkk. (2021)

Transparansi berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja.

2. Menurut penelitian Detasya Rigian,dkk. (2018) Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

3. Menurut penelitian Yassir,dkk. (2022) Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

2.2.3 Pengaruh Pengawasan Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja

Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan didalam penganggaran, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi melalui tindakan koreksi ini maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal.

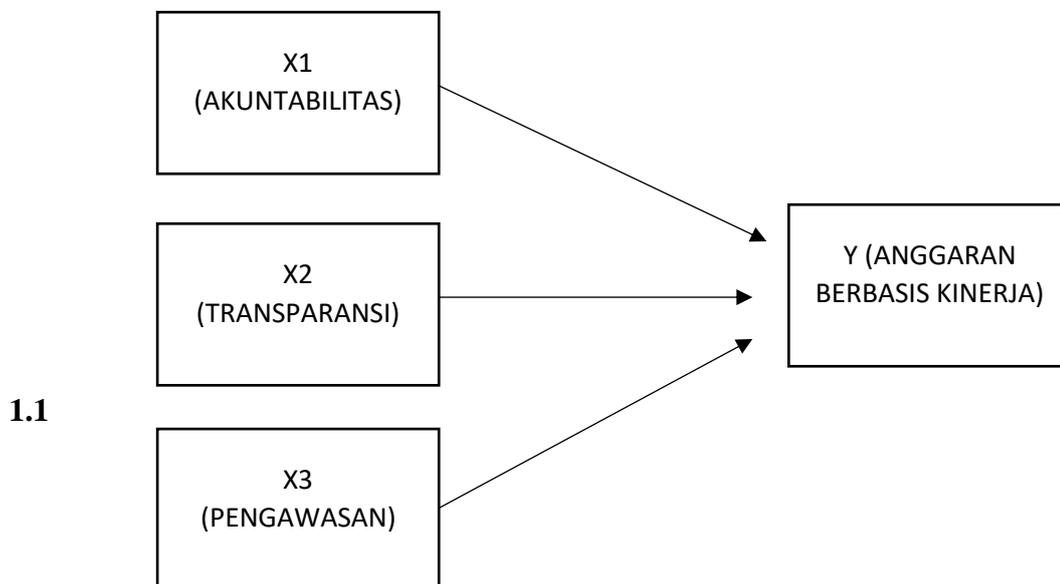
Pengawasan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis Menurut Pramono (2002:98). Pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan didalam penganggaran, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi melalui tindakan koreksi ini maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Revrisond Baswir (2017: 118), Pengawasan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan. Salah satu aspek pengawasan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan anggaran berbasis kinerja yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu:

1. Menurut penelitian Ditiya Jumaya,dkk. (2022) Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.
2. Menurut penelitian Fira Sriwijaya,dkk. (2022) Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.
3. Menurut penelitian Dominicus,dkk. (2020) Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

2.2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis adalah:

“Hipotesis Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara empiris.”

Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

H2: Transparansi Berpengaruh Terhadap Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

H3: Pengawasan Berpengaruh Terhadap Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.